

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan politik internasional semakin kompleks dengan munculnya aktor-aktor baru di luar negara. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor di luar negara yang juga memiliki kompleksitas di dalamnya. Uni Eropa adalah organisasi supranasional yang terletak pada benua Eropa. Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan yang memicu adanya gejolak dalam organisasi internasional ini. Pada akhirnya, salah satu anggota negara Uni Eropa, Inggris Raya mengadakan referendum untuk keluar dari Uni Eropa pada 2016, yang dikenal dengan istilah Brexit (*British Exit*). Melalui Brexit, terdapat transformasi perubahan kebijakan pada Inggris Raya, salah satunya kebijakan terkait migrasi. Transformasi kebijakan ini akibatnya berdampak kepada penurunan pekerja migran di Inggris Raya dan mengakibatkan ketidakstabilan dalam sektor industri-industri di Inggris Raya, salah satunya adalah industri agrikultur. Melalui kebijakan baru ini, Inggris Raya membuat strategi dalam mengatasi permasalahan pasca transformasi kebijakan migrasi baru era Brexit yang membatasi arus pekerja migran pada sektor industri dan sistem agrikultur di Inggris Raya. Menurut *UK Farming Union Representative*, selama ini Inggris Raya mengandalkan tenaga kerja migran. Pekerja migran adalah aktor penting yang sama pentingnya dengan pupuk dan penyemprot pada bidang agrikultur (Milbourne & Coulson, 2021a).

Sebelum referendum Brexit, ketika ekspansi Uni Eropa pada 2004 dan 2011, terlihat tren migrasi dan perpindahan warga negara dari negara-negara Uni Eropa ke Inggris Raya yang cenderung tinggi (Portes, 2022). Selama periode 20 tahun sebelum referendum Brexit, terlihat dari data resmi pemerintah bahwa pertumbuhan angka jumlah penduduk Inggris Raya yang berasal atau lahir dari negara-negara Uni Eropa meningkat dua kali lipat menjadi 3,6 juta (lebih dari 5 persen). Sekitar satu dari lima anggota masyarakat Uni Eropa yang bermigrasi telah tinggal di Inggris Raya, dengan konsentrasi terbanyaknya terdapat di London dan wilayah selatan-tengah Inggris (Office for National Statistics, 2019). Data berikut dapat disimpulkan bahwa adanya tren tingkat migran yang tinggi sebelum

referendum Brexit di Inggris Raya. Hal tersebut menjadi salah satu pendorong diadakannya referendum Brexit.

Permasalahan migrasi merupakan pusat politik dari Brexit (*British Exit*), terlebih dalam masalah konsekuensinya terhadap ekonomi di Inggris Raya dalam referendum Brexit (Portes, 2022). Fenomena permasalahan Brexit dan pembaruan kebijakan migrasi selepasnya dari Uni Eropa penting dibahas dalam studi Hubungan Internasional. Permasalahan baik dari segi kendali atas kedaulatan wilayahnya, hingga ke kebijakan sistem migrasi. Lebih lanjut keputusan Brexit diperkarai oleh masalah migran yang dihadapi Inggris Raya dalam kurun waktu yang lama. Di Inggris dan Wales, jumlah warga keturunan asing melonjak menjadi 13,4% dari populasi pada 2011, sekitar dua kali lipat dibandingkan 1991. Beberapa tahun terakhir, migran telah tergiur dengan ekonomi di negara Eropa yang tumbuh dua kali lipat dalam zona Eropa (Pammasena, 2017). Adanya fakta bahwa Inggris merupakan negara yang berada di kawasan Eropa. Dengan tingkat ekonomi terbesar kedua setelah Jerman dan dengan tingkat populasi terbanyak ketiga setelah Perancis. Fakta tersebut menjadikan Inggris Raya sasaran tempat tinggal migran dengan motif mencari kehidupan lebih baik lagi (Pammasena, 2017). Pemungutan suara Brexit di Inggris Raya untuk melepaskan keanggotaan Uni Eropa dimotivasi secara tegas terhadap pergerakan bebas warga negara Uni Eropa untuk bermigrasi ke Inggris Raya (Lutz, 2021).

Sistem Uni Eropa yang memberikan hak kepada warga negara anggotanya untuk dapat tinggal dan bekerja di dalam semua negara anggotanya, yang merupakan fondasi utama dari Uni Eropa. Tidak adanya batasan dalam bermigrasi di kawasan Uni Eropa merupakan sebuah pencapaian penting dalam integrasi Eropa, di satu sisi hal tersebut juga menjadi pemicu munculnya Euroskeptisisme. Poin penting yang menjadi pendorong Euroskeptisisme berkaitan dengan identitas nasional dan sentimen anti migrasi. Sikap negatif terhadap migrasi merupakan hasil dari ancaman identitas nasional yang dirasakan oleh para Euroskeptisisme. Menurut McLaren, adanya pandangan bahwa migrasi orang-orang Eropa dan migrasi orang-orang non-Eropa itu identik dan sama (Lutz, 2021). Gerakan warga Inggris Raya melalui Brexit untuk keluar dari Uni Eropa merupakan kampanye untuk menunjuk mobilisasi migran Eropa, terkhusus warga negara Eropa yang berasal dari Eropa

Tengah dan Eropa Timur dengan pandangan yang negatif. Para pendukung Euroskeptisme membangun narasi kuat untuk membuat kelompok migran ini keluar dari Inggris Raya karena sudah di luar batas dengan merebut lapangan pekerjaan, membebani sistem bantuan kesejahteraan negara, dan mengancam identitas nasional negara (Milbourne & Coulson, 2021a).

Pada 23 Juni 2016, dunia internasional mengamati titik balik ekonomi dan politik di Inggris Raya. Negara yang terkenal dengan toleransi anggota negaranya, kekuatan institusinya, dan kebijakan luar negeri yang fokus keluar dan terukur, melakukan referendum Brexit untuk menarik diri dari keanggotaannya di Uni Eropa. Referendum Brexit yang diadakan pada 2016 menghasilkan perolehan suara sebesar 17.410.742 pemilih Inggris Raya memilih untuk mengakhiri keanggotaan mereka di Uni Eropa sementara 16.141.241 pemilih Inggris Raya ingin tetap bertahan dalam Uni Eropa (Arnorsson & Zoega, 2018).

Selanjutnya, tren migrasi selama referendum Brexit berlangsung di Inggris Raya. Didapati tingkat migrasi pada Juni 2016 mencapai tingkat tertinggi sebanyak 333.000 orang. Setelah pemungutan suara untuk keluar dari Uni Eropa melalui Brexit, didapati penurunan tingkat pertumbuhan pekerja yang signifikan di Inggris Raya, dibandingkan dengan negara lain di Uni Eropa yang memiliki penurunan tingkat pengangguran. Penurunan tingkat pekerja di Inggris Raya terjadi karena isu Brexit mempengaruhi ekonomi dari segi pertumbuhan, *output*, pekerjaan, dan penurunan nilai mata tukar Poundsterling yang kurang menarik sebagai negara tujuan bermigrasi. Selanjutnya alasan lain penurunan pertumbuhan tingkat pekerja di Inggris Raya juga terdapat faktor legal dan psikologis tentang ketidakpastian terkait hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang berasal dari negara-negara Uni Eropa mengenai masa depan Inggris Raya setelah Brexit, mulai dari permasalahan iklim politik dan sosial, dan sentimen tentang Inggris Raya yang sudah tidak ramah lagi terhadap para migran dari Uni Eropa (Portes, 2022).

Sejak terjadinya referendum Brexit di Inggris Raya pada 2016 serta resminya melepaskan diri dari Uni Eropa pada 2020, terjadi transformasi kebijakan yang dipegang oleh Inggris Raya. Permasalahan yang terjadi dalam Uni Eropa yang dirasakan oleh Inggris Raya adalah kurangnya kontrol terhadap negaranya sendiri. Inggris Raya memiliki kewajiban untuk patuh dalam kebijakan yang dikeluarkan

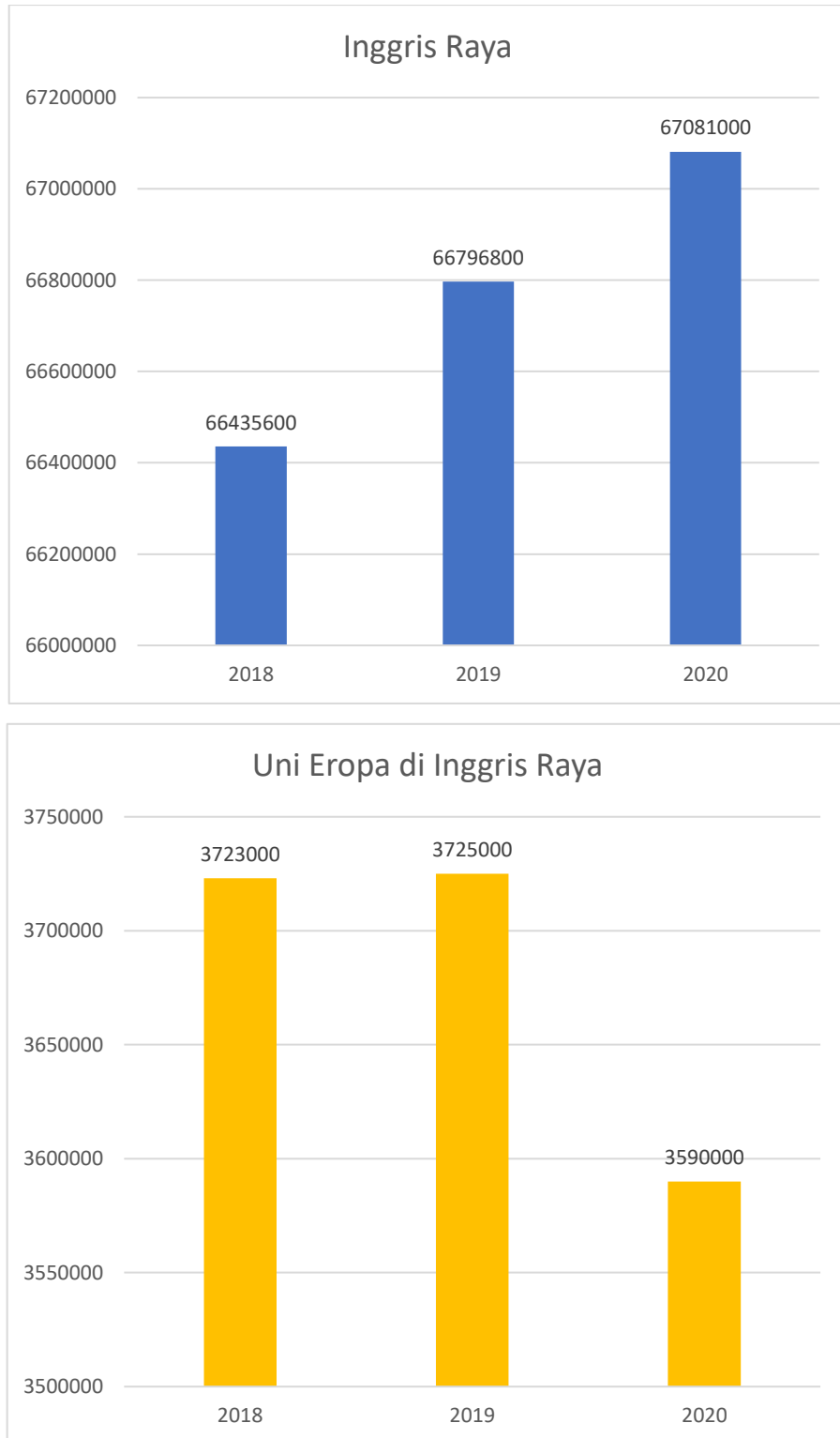
dan ditetapkan oleh Uni Eropa (Putra dkk., 2020). Penentuan keputusan kebijakan yang seharusnya menjadi hak otonom kedaulatan suatu negara berdaulat, merupakan hak penuh yang seharusnya dimiliki oleh Inggris Raya. Dalam kasus kebijakan Inggris Raya, di sini Uni Eropa yang menentukan keputusan melalui proses perundingan antar eksekutif Uni Eropa yang disebut Komisi Eropa (Hartanto, 2018). Diungkapkan bahwa kedaulatan negara memiliki kewenangan tertinggi dan mandiri untuk mengatur masyarakat dalam wilayahnya, meskipun negara secara sah memberikan kewenangan kepada institusi internasional (Hathaway, 2018). Dari berbagai kebijakan yang ada, penulis berfokus terhadap kebijakan Uni Eropa yang harus dipatuhi dan diikuti oleh negara-negara anggota Uni Eropa, yaitu adalah kebijakan “*Free Movement of Persons*”. Kebijakan tersebut mengandung isi untuk membuka gerbang keamanan atau perbatasan negara-negara anggota Uni Eropa untuk memberikan kebebasan migrasi untuk masuk dan menetap di negaranya. Pada dasarnya, kebijakan ini dirumuskan karena alasan kepentingan bersama Uni Eropa dan alasan kemanusiaan. Sepanjang waktu, dengan menjadi anggota Uni Eropa, Inggris Raya seakan kehilangan kontrol terhadap negaranya sendiri. Dalam kasus ini, kendali untuk mengatur perbatasan dan keamanan negaranya sendiri. Melalui fenomena ini, akhirnya Inggris Raya menerima lonjakan peningkatan arus imigran yang tinggi (Putra dkk., 2020).

Keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa yang dilakukan oleh Inggris Raya melalui Brexit pada 31 Januari 2020 berdampak secara luas terhadap kompleksitas ekonomi, sosial, dan politik yang telah dibangun Inggris Raya dan Uni Eropa selama beberapa dekade. Melalui Brexit ini Inggris Raya akan berkomitmen kepada kebutuhan warga negaranya dan mengambil kembali kendali atas wilayahnya. Inggris Raya pada Februari 2020 mengumumkan kebijakan baru dalam migrasi internasional yang fokus terhadap sistem poin dalam membatasi jumlah angka pekerja migran kurang terampil (*lower skilled workers*) dan pekerja tidak terampil (*unskilled workers*) yang dapat memasuki, tinggal, dan kerja di negaranya. Selama beberapa tahun ke belakang sebelum Brexit, sistem imigrasi Uni Eropa gagal dalam memuaskan kebutuhan warga Inggris Raya (Home Office, 2020).

Keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa dapat menjadi ancaman yang berlanjut dalam pasokan tenaga kerja migran dari negara-negara Uni Eropa, khususnya dalam sektor industri agrikultur. Ancaman-ancaman tersebut dapat dilihat melalui berbagai cara. Pertama, keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa menyebabkan nilai mata uang poundsterling Inggris Raya turun terhadap dolar Amerika Serikat dan euro Uni Eropa sehingga hal tersebut meningkatkan harga pangan, melihat Inggris Raya juga mengimpor bahan pangan dan juga dapat mengurangi pendapatan pekerja migran Uni Eropa di Inggris Raya. Kedua, ancaman datang dari ketidakpastian status tempat tinggal pekerja migran Uni Eropa di Inggris Raya di masa depan. Ketiga, berkaitan dengan pembatasan baru dari mobilisasi antar negara Uni Eropa dengan Inggris Raya. Keempat berkaitan dengan budaya dan politik Inggris Raya yang terjadi dalam debat referendum pada 2016 yang condong membahas permasalahan dan retorika anti migrasi (Milbourne & Coulson, 2021a).

Berakhirnya sistem pergerakan bebas (*free movement of persons*) Uni Eropa di Inggris Raya menciptakan kekurangan pekerja dalam pasar tenaga kerja terutama dalam industri yang bergantung pada migran (Sumption, 2022). Perluasan Uni Eropa pada 2004 dengan memasukkan negara-negara A8 seperti Estonia, Republik Ceko, Lituania, Hongaria, Latvia, Lituania, Slovenia, Slovakia, dan Polandia, serta pada 2007 negara-negara A2 seperti Bulgaria dan Rumania menghasilkan peningkatan dalam jumlah migran negara-negara anggota baru Uni Eropa yang bermigrasi ke Inggris Raya dalam mencari pekerjaan. Migran yang bekerja dari negara-negara tersebut mencari pekerjaan di sektor agrikultur dan para pekerja migran ini sekarang dipandang sebagai komponen penting dalam sistem agrikultur di Inggris (Milbourne & Coulson, 2021b).

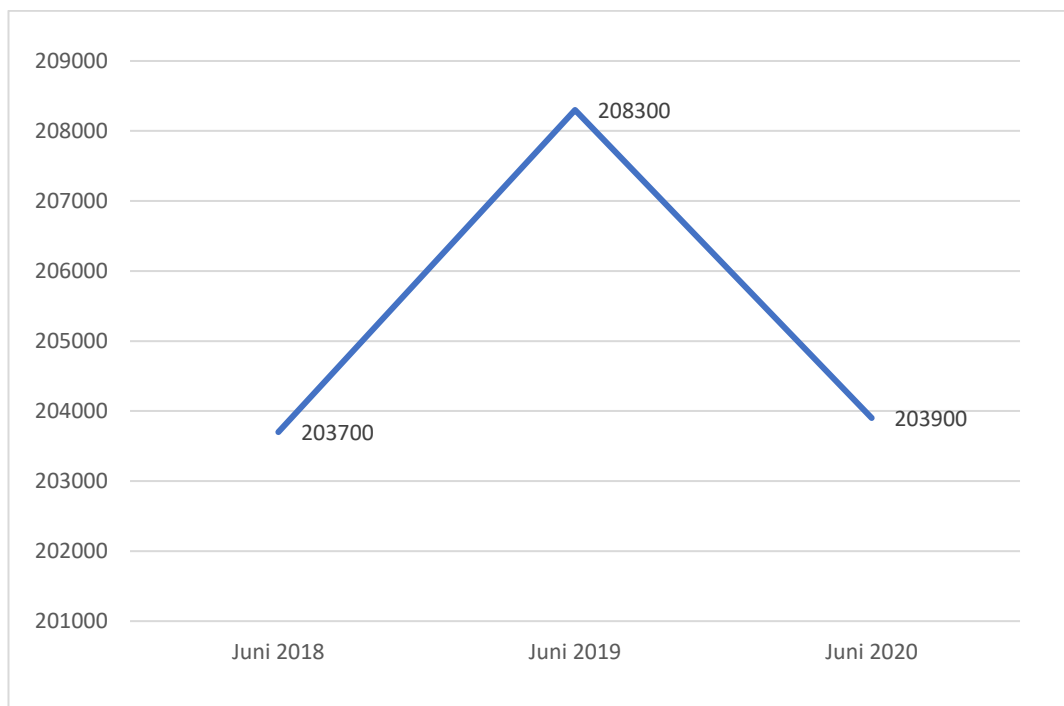
Grafik 1.1 Populasi Warga Inggris Raya dan Uni Eropa di Inggris Raya



Sumber: Office for National Statistics (ONS), 2021

Penurunan populasi warga Uni Eropa di Inggris Raya terjadi pada Juni 2020. Pada tahun 2018, jumlah populasi warga Uni Eropa di Inggris Raya adalah 3.723.000 dari total 66.435.600 warga Inggris Raya. Di tahun selanjutnya, warga Uni Eropa di Inggris Raya pada tahun 2019 naik menjadi 3.725.000 dari total 66.796,800 warga Inggris Raya. Momentum kenaikan ini turun setelah Inggris Raya resmi keluar dari Uni Eropa pada tahun 2020. Warga Uni Eropa di Inggris Raya menjadi 3.590.000 setelah momentum Brexit terjadi dari total 67.081.000 (Office for National Statistics, 2021).

Grafik 1.2 Total Pekerja di Industri Agrikultur Inggris Raya

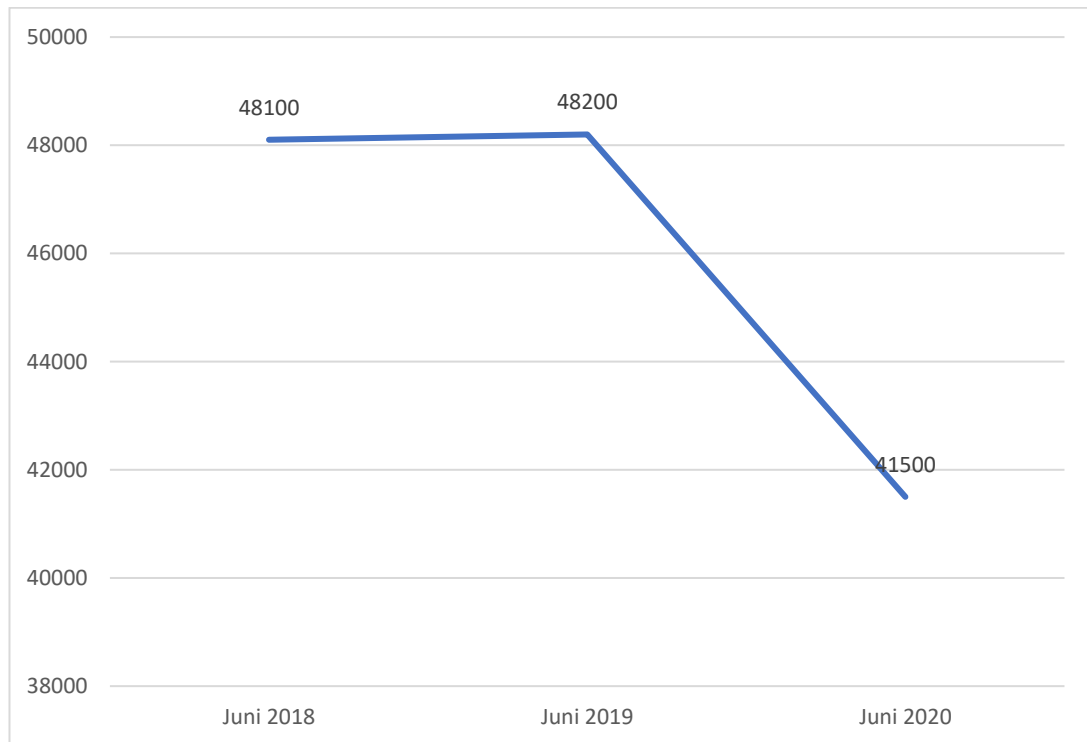


Sumber: His Majesty's Revenue and Customs (HMRC), 2022

Pekerja di industri agrikultur di Inggris Raya adalah individu yang dipekerjakan di sektor agrikultur. Pernyataan tersebut termasuk pekerja agrikultur, teknisi agrikultur, dan profesi lainnya yang terlibat dalam produksi, pemrosesan, dan distribusi barang agrikultur. Grafik 1.2 melaporkan total jumlah pekerja di bidang agrikultur (termasuk pekerja dari Inggris Raya, Uni Eropa, dan di luar Uni Eropa). Pada Juni 2018, total pekerja di industri agrikultur Inggris Raya adalah 203.700 orang. Selanjutnya pada Juni 2019, tingkat total pekerja di industri agrikultur Inggris Raya naik sebesar 2,25% dengan total 208.300 orang. Terakhir

pada Juni 2020, terjadi penurunan tingkat pekerja di industri agrikultur Inggris Raya sebesar 2,11% dengan total 203.900 orang (His Majesty's Revenue and Customs, 2022).

Grafik 1.3 Total Pekerja dari Uni Eropa di Industri Agrikultur Inggris Raya



Sumber: His Majesty's Revenue and Customs (HMRC), 2022

Pekerja di industri agrikultur dari Uni Eropa merupakan individu yang berasal dari negara-negara Uni Eropa yang bekerja di sektor agrikultur di Inggris Raya. Industri agrikultur Inggris Raya sangat bergantung pada migrasi Uni Eropa (Barathova, 2018). Grafik 1.3 melaporkan total pekerja dari Uni Eropa di Industri Agrikultur Inggris Raya. Pada Juni 2018, dilaporkan total pekerja dari Uni Eropa adalah 48.100 orang. Selanjutnya pada Juni 2019, dilaporkan kenaikan total pekerja dari Uni Eropa sebesar 0,2% dengan total 48.200 orang. Terakhir pada Juni 2020, dilaporkan terdapat penurunan total jumlah pekerja yang signifikan sebesar 13,9% dari tahun 2019 dengan total 41.500 orang (His Majesty's Revenue and Customs, 2022). Saat ini beberapa sektor agrikultur dan daerah sangat bergantung pada pekerja migran. Berdasarkan *Report* dari The Migration Advisory Committee's 2019 dalam EEA Migration, disoroti bahwa 99% pekerja musiman di sektor

agrikultur Inggris Raya berasal dari Uni Eropa yang secara realistis tidak dapat digantikan dengan tenaga kerja domestik (National Farmers Union, 2021b).

Industri agrikultur di Inggris Raya sangat bergantung terhadap pekerja migran dari Eropa Timur dan Eropa Tengah. Para pekerja migran ini sering dilabelkan sebagai pekerja tidak terampil (Byrn, 2018). Pada 2020 produktivitas dan pendapatan industri agrikultur Inggris Raya menurun. Mulai dari pendapatan bisnis peternakan, total pendapatan dari pertanian, *gross output*, biaya konsumsi, nilai tambah kotor pada harga dasar, input pertanian, total faktor produktivitas, dan nilai dari beberapa komoditas agrikultur seperti produk susu (Government of the United Kingdom, 2020).

Tabel 1.1 Pendapatan Bisnis Agrikultur di Inggris Raya

Pendapatan bisnis agrikultur rata-rata per lahan (£ lahan)	2017/18	2018/19	2019/20
Inggris Raya (h)			
Biji-bijian seperti gandum, oat, dan jagung (<i>cereals</i>)	59.500	66.500	60.500
<i>General cropping</i>	82.500	110.500	80.500
Semua jenis (termasuk hortikultura)	47.500	44.000	39.000
Total	189.500	221.000	180.000

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), 2021

Terdapat dalam tabel 1.1 di atas, terjadi fluktuasi pendapatan bisnis agrikultur di Inggris Raya tiap tahunnya. Produk pertama, yaitu biji-bijian mendapatkan pendapatan 59.500 poundsterling per lahan pada 2017/2018. Selanjutnya, pendapatan dalam produk biji-bijian meningkat sebesar 11,76% pada 2018/2019 menjadi 66.500 poundsterling per lahan. Terakhir, pendapatan dalam produk biji-bijian menurun sebesar 9,02% pada 2019/2020 menjadi 60.500 poundsterling per lahan dibanding tahun sebelumnya. Produk kedua, yaitu *general cropping* mendapatkan pendapatan 82.500 poundsterling per lahan pada 2017/2018. Selanjutnya, pendapatan dalam produk *general cropping* meningkat

sebesar 33,94% pada 2018/2019 menjadi 110.500 poundsterling per lahan. Terakhir, pendapatan dalam produk *general cropping* menurun sebesar 27,15% pada 2019/2020 menjadi 80.500 poundsterling per lahan dibandingkan tahun sebelumnya, dan lebih rendah dibandingkan tahun 2017/2018. Produk terakhir, yaitu semua jenis (termasuk hortikultura) mendapatkan pendapatan 47.500 poundsterling per lahan pada 2017/2018. Selanjutnya, pendapatan dalam produk semua jenis (termasuk hortikultura) menurun sebesar 7,37% pada 2018/2019 menjadi 44.000 poundsterling per lahan. Terakhir, pendapatan dalam produk semua jenis (termasuk hortikultura) menurun sebesar 11,36% pada 2019/2020 menjadi 39.000 poundsterling per lahan dibandingkan tahun sebelumnya, dan terus turun dari tahun 2017/2018 hingga tahun 2019/2020. Berdasarkan total ketiga produk di atas, total pendapatan sektor agrikultur pada 2017/2018 di Inggris Raya pada 2017/2018 adalah 189.500 poundsterling per lahan. Selanjutnya, total pendapatan sektor agrikultur meningkat sebesar 16,62% pada 2018/2019 menjadi 221.000 poundsterling per lahan. Terakhir, total pendapatan sektor agrikultur menurun sebesar 18,55% pada 2019/2020 menjadi 180.000 poundsterling per lahan dibandingkan tahun sebelumnya, dan total pendapatan lebih rendah dibandingkan tahun 2017/2018 (DEFRA, 2021).

Berlandasan dengan permasalahan yang diangkat, ada berbagai penelitian yang membahas isu ini dari beberapa perspektif. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait dinamika Brexit dan dampaknya terhadap migrasi internasional. Fokus disorot dalam penelitian sebelumnya ini, berkaitan dengan akses mobilitas khusus yang dimiliki oleh anggota negara Uni Eropa untuk bermigrasi yang hilang setelah Brexit. Menggunakan artikel yang ditulis oleh Heather Rolfe dalam *Challenges for Immigration Policy in Post-Brexit Britain: Introduction* (2019) dijelaskan bahwa imigrasi adalah permasalahan kunci dalam ekonomi dan sosial. Dalam artikel ini Rolfe melihat bahwa agenda politik dalam referendum Brexit berhasil menghilangkan relasi antara Inggris Raya dan Uni Eropa dalam sistem kebebasan anggota masyarakat Uni Eropa untuk bermigrasi (*Free Movement of Persons*). Rolfe menjelaskan bahwa akan ada kebijakan baru terkait permasalahan migrasi setelah keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa. Kebijakan baru ini menetapkan akan menerima mobilisasi pekerja migran dengan

sistem yang berbasis keterampilan. Di Inggris Raya, perekrut pekerja sulit untuk merekrut pekerja lokal dalam sektor-sektor seperti perawatan sosial, perhotelan, agrikultur, pergudangan, dan konstruksi. Rolfe melihat bahwa pekerjaan dalam sektor tersebut dianggap tidak menarik bagi pekerja Inggris Raya, sehingga pekerja pada sektor tersebut terkonsentrasi pada migran Uni Eropa. Rolfe melihat bahwa semenjak referendum, net migrasi yang berasal dari Uni Eropa telah turun cukup jauh sejak 2009. Rolfe menjelaskan bahwa hilangnya pergerakan bebas yang dimiliki anggota masyarakat Uni Eropa dan kebijakan migrasi baru menjadikan Inggris Raya menjadi tempat tujuan migrasi yang kurang populer bagi warga negara Uni Eropa (Rolfe, 2019).

Hal tersebut sepemikiran dengan Rebecca Gumbrell-McCormick dan Richard Hyman yang mereka tulis dalam *What about the workers? The implications of Brexit for British and European labour* (2017) setelah meneliti terkait implikasi Brexit terhadap tenaga kerja Inggris Raya dan Eropa. Gumbrell-McCormick dan Hyman melihat bahwa referendum Brexit adalah manuver politik yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri David Cameron dalam menghadapi *Europhobia* yang berkembang di partainya. Lebih lanjut, bahwa kasus migrasi menjadi isu utama dalam debat referendum. Inggris Raya sendiri merupakan salah satu dari tiga negara yang mengizinkan pergerakan bebas langsung tenaga kerja dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang bergabung pada Uni Eropa pada 2004 dengan alasan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja. Gumbrell-McCormick dan Hyman menjelaskan bahwa 16.7% pekerja di Inggris adalah pekerja yang lahir di luar negeri. Gumbrell-McCormick dan Hyman melihat dengan Inggris Raya kini dapat membuat dan memperkuat peraturan ketenagakerjaan (Gumbrell-McCormick & Hyman, 2017).

Permasalahan industri agrikultur setelah Brexit di Inggris Raya selanjutnya dibahas oleh Paul Milbourne dan Helen Coulson dalam tulisannya *Migrant labour in the UK's post-Brexit agri-food system: Ambiguities, contradictions and precarities* (2021). Di dalam tulisannya, Milbourne dan Coulson memantau adanya tekanan dari pengecer global untuk menekan biaya produksi industri, sehingga banyak yang mempekerjakan tenaga kerja migran dari negara-negara berpenghasilan rendah untuk menekan biaya. Di Inggris Raya sendiri, sektor

agrikultur dan pangan sebagian besar pekerjaannya adalah migran dari negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur. Milbourne dan Coulson menjelaskan bahwa kejadian Brexit menciptakan adanya “krisis” terkait pasokan tenaga kerja migran. Milbourne dan Coulson melakukan analisis data survei nasional tentang pekerja migran di industri agrikultur dengan melakukan wawancara ke lebih dari 70 organisasi agrikultur di Inggris Raya. Di dalam penelitiannya, Milbourne dan Coulson mendapatkan hasil bahwa alih-alih melihat momentum Brexit sebagai kunci untuk mengkritik sistem agrikultur di Inggris Raya, tapi aktor dominan fokus memperdebatkan mekanisme kebijakan baru dalam menjamin penyediaan tenaga kerja migran dengan biaya murah setelah Brexit (Milbourne & Coulson, 2021b).

Selanjutnya, Franziska Sohns dan Dariusz Wojcik dalam tulisannya *The impact of Brexit on London's entrepreneurial ecosystem: The case of the FinTech industry* (2020) menjelaskan dampak Brexit terhadap industri FinTech di London. Artikel ini menganalisis bagaimana pelaku wirausaha menanggapi ketidakpastian politik dan perubahan peraturan institusi. Sohns dan Wojcik juga membahas dampak dari tanggapan berbagai tingkat aktor pada ketahanan ekosistem kewirausahaan, dengan fokus pada pengaruh mereka terhadap keragaman dan konektivitas di antara para pelakunya. Di artikel ini, menerapkan data yang dikumpul dari wawancara mendalam, yang mencakup berbagai kelompok pemangku kepentingan pada industri FinTech di London seperti investor, bank, penasihat hukum, organisasi lobi, dan perusahaan swasta untuk menjawab bagaimana keputusan Inggris Raya untuk meninggalkan Uni Eropa mempengaruhi industri FinTech. Hasilnya, menunjukkan bahwa ketidakpastian politik dan prospek perubahan institusi dapat memicu reaksi tingkat aktor, yang berpotensi mengubah keragaman serta konektivitas antara ekosistem lokal dan non-lokal. Sohns dan Wojcik juga menunjukkan bahwa sifat reaksi strategis dari pelaku wirausaha sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik perusahaan, seperti usia, ukuran, spesialisasi produk, dan struktur jaringan egosentris. Hasil akhir yang ditunjukkan terlihat bahwa *anchor firms* memainkan peran penting dalam jaringan egosentris perusahaan lain dan memiliki kekuatan untuk membentuk tanggapan strategis (Coulson & Milbourne, 2022).

Berikutnya Helen Coulson dan Paul Milbourne dalam tulisannya *Agriculture, food and land: Struggles for UK post-Brexit agri-food justice* (2022) mengkaji kemungkinan dan tantangan dalam mempertahankan keadilan agrikultur dengan menggunakan lahan sebagai fondasi dasar dalam konteks Brexit yang dilaksanakan Inggris Raya untuk meninggalkan Uni Eropa. Coulson dan Milbourne mengembangkan lensa keadilan agrikultur dengan mengungkap kontestasi perjuangan untuk mengubah lanskap Brexit agrikultur pangan fisik dan politik dengan cara yang lebih adil. Penelitian ini menganalisis ketegangan dan kesulitan dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan lingkungan berkaitan dengan agrikultur di Inggris Raya, baik dari dinamika kekuatan yang tidak setara dari segi politik dan kebijakan agrikultur. Coulson dan Milbourne mengungkapkan politik tersembunyi dari ketidakadilan lahan yang sudah tertanam secara historis di Inggris Raya. Fokus dari artikel ini berhubungan dengan lahan dan konstelasi yang saling berpotongan antara tenaga kerja di bidang agrikultur, modal, dan pengetahuan. Terakhir, dibahas terkait keterbatasan pendekatan *public goods* yang lahir terhadap kebijakan agrikultur di bawah “Brexit Hijau” yang diperdebatkan berdasarkan keadilan lahan dan pangan untuk mengolah masa depan yang lebih adil (Sohns & Wójcik, 2020).

Melalui permasalahan ini, Inggris Raya yang bukan lagi anggota dari Uni Eropa membuat undang-undang baru dalam mengatasi berbagai kekurangan yang menurut Inggris Raya terdapat pada aturan Uni Eropa. Setelah Brexit, Inggris Raya mengeluarkan Kebijakan Agrikultur 2020 (*Agriculture Act 2020*). Dalam UU tersebut, mencakup bantuan keuangan, pasar makanan dan pertanian, transparansi dan keadilan dalam rantai pasokan pertanian pangan, hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pedesaan, produk pertanian, perjanjian WTO tentang pertanian, Wales dan Irlandia Utara, dan ketentuan umum dan akhir. Selain itu, Inggris Raya juga meluncurkan strategi-strategi lain seperti Visa Pekerja Musiman, Sistem Imigrasi Berbasis Poin, Mendorong Pekerja Lokal dan Otomatisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha melakukan penelitian bersinggungan dengan dampak dari Brexit terhadap pekerja migran dan kaitannya dengan permasalahan industri agrikultur di Inggris Raya. Hal ini, berkaitan dengan kurangnya pekerja migran dalam industri agrikultur di Inggris Raya yang bergantung pada pekerja migran dari Eropa Timur dan Eropa Tengah. Melalui hal

tersebut, Inggris Raya yang bukan lagi anggota Uni Eropa dan terlepas dari aturan Uni Eropa melaksanakan strategi dengan membuat Kebijakan Agrikultur 2020 (*Agriculture Act 2020*), Visa Pekerja Musiman, Sistem Imigrasi Berbasis Poin, Mendorong Pekerja Lokal dan Otomatisasi dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari keluarnya Inggris Raya dalam keanggotaan Uni Eropa pada industri agrikultur negaranya.

I.2 Rumusan Masalah

Dampak dari keluarnya Inggris Raya dari keanggotaan Uni Eropa pada 2020 melalui Brexit secara langsung mengganggu stabilitas nasional negara tersebut. Khususnya, dalam penelitian ini terdapat pada permasalahan pekerja migran dan hubungannya dengan industri agrikultur. Pada akhirnya, Inggris Raya melakukan upaya membuat strategi dengan merumuskan Kebijakan Agrikultur 2020 (*Agriculture Act 2020*), Visa Pekerja Musiman, Sistem Imigrasi Berbasis Poin, Mendorong Pekerja Lokal dan Otomatisasi. dalam mengatasi permasalahan industri agrikultur di negaranya. Merujuk dan dilatarbelakangi hal tersebut penulis berusaha menyimpulkan pertanyaan berupa, **“Bagaimana Pengaruh Strategi Inggris Raya dalam Meminimalisir Permasalahan di Industri Agrikultur Pasca Kebijakan Imigrasi Brexit Periode 2020-2022?”**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami strategi yang dilakukan Inggris Raya dalam penyelesaian permasalahan industri agrikultur negaranya pasca Brexit di periode 2020-2022.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Membagikan sumbangan informasi dan pemikiran bagi akademisi hubungan internasional, berupa Dosen dan Mahasiswa dalam kajian untuk memahami bagaimana strategi Inggris Raya pasca kebijakan migrasi Brexit dalam upayanya mengatasi permasalahan industri agrikultur di negaranya.

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aktor hubungan internasional, baik dari skala individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam level nasional, regional, dan internasional tentang penyelesaian permasalahan industri agrikultur akibat keluarnya suatu negara dari organisasi supranasional dan adaptasi perubahan sistem dan kebijakan yang berlaku.

I.5 Sistematika Penulisan

Dengan maksud memaparkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang terdapat pada skripsi ini, penulis membagi laporan penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian bab ini terdiri dari uraian konsep, teori, dan kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bagian bab ini terdiri dari uraian mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini yang di dalamnya berisi pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV: DINAMIKA INDUSTRI AGRIKULTUR PASCA BREXIT DI INGGRIS RAYA

Bagian bab ini membahas dinamika industri agrikultur Inggris Raya. Kemudian fenomena dinamika industri agrikultur dihubungkan dengan berkurangnya pekerja migran di Inggris Raya pasca Brexit.

BAB V: STRATEGI INGGRIS RAYA PASCA KEBIJAKAN IMIGRASI BREXIT TERHADAP PERMASALAHAN INDUSTRI AGRIKULTUR PERIODE 2020-2022

Bagian bab ini terdiri dari strategi dan hasil realisasi strategi Inggris Raya dalam meminimalisir permasalahan industri agrikultur setelah melepaskan diri dari keanggotaannya di Uni Eropa.

BAB VI: PENUTUP

Bagian bab ini akan berisi terkait kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA